

ABSTRAK

TATA KELOLA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

ADIB AL HAFIZ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola peningkatan penanaman modal di Provinsi Lampung dengan fokus pada peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum tercapainya target realisasi investasi tahun 2024, khususnya pada sektor Penanaman Modal Asing (PMA), yang mengindikasikan adanya tantangan dalam kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan investasi di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kerangka analisis merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, dan orientasi pada kepentingan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap aparatur DPMPTSP, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Lampung mengalami peningkatan, terutama dalam aspek transparansi melalui pemanfaatan sistem perizinan berbasis digital dan keterbukaan informasi. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang berdampak pada efektivitas pelayanan dan tingkat kepercayaan investor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip good governance menjadi faktor strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Tata Kelola, Good Governance, Penanaman Modal, DPMPTSP, Investasi Daerah.

ABSTRACT

“Investment Governance in Lampung Province: A Study of the Provincial Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP)”

By

ADIB AL HAFIZ

This study aims to analyze the governance of investment promotion in Lampung Province with a focus on the role of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) of Lampung Province. The background of this research is based on the failure to achieve the investment realization target in 2024, particularly in the Foreign Direct Investment (FDI) sector, which indicates challenges in the quality of public service delivery and investment management at the regional level. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. The analytical framework refers to the principles of good governance, including transparency, accountability, participation, legal certainty, and public interest orientation. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies involving DPMPTSP officials, business actors, and relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investment governance at the DPMPTSP of Lampung Province has shown improvement, particularly in terms of transparency through the use of digital-based licensing systems and public information disclosure. However, several obstacles remain, including regulatory inconsistencies, limited human resource capacity, and weak inter-agency coordination, which affect service effectiveness and investor confidence. This study concludes that strengthening the principles of good governance is a strategic factor in creating a conducive and sustainable investment climate in Lampung Province.

Keywords: Governance, Good Governance, Investment, DPMPTSP, Regional Investment.